

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara memiliki politik luar negeri yang berbeda-beda karena politik luar negeri yang ditetapkan disesuaikan dengan politik domestik negara yang bersangkutan, hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Shoelhi (2011, hlm. 134) bahwa politik luar negeri merupakan pencerminan, perluasan dan kelanjutan politik domestik. Bagi suatu negara politik luar negeri sangatlah penting sebab politik luar negeri merupakan landasan dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, selain itu politik luar negeri yang dianut oleh suatu negara juga merupakan cerminan bagi negara dalam bergaul dengan forum internasional.

Lahirnya benih-benih awal politik luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi awal kemerdekaan Indonesia, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia merupakan warisan dari pengalaman bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan (Leifer, 1989, hlm. 5) karena pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia meraih kemerdekaan, dan Indonesia sebagai negara yang saat itu baru merdeka dihadapkan pada dua kekuatan besar yang tengah berkecamuk dalam perang dingin antara Blok Amerika Serikat (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur). Indonesia menetapkan prinsip yaitu tidak memihak pada salah satu blok, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Indonesia Sjahrir pada bulan Februari 1948 di depan Komite Nasional Indonesia Pusat suatu janji atau keterikatan hati pada ketidakberpihakan, para politologis menyebut konsep yang diikrarkan oleh Sjahrir tersebut dengan istilah politik non-blok (Kusumohamidjojo, 1985, hlm. 35).

Ketika Moh.Hatta menjadi Perdana Menteri Indonesia menggantikan Amir Sjarifoeddin, pada saat itulah secara resmi politik luar negeri Indonesia ditetapkan. Tepatnya Pada tanggal 2 September 1948 Hatta memberikan keterangan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) terkait kedudukan politik Indonesia (Widjaja & Swasono, 2002, hlm. 107), yaitu Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia menolak masuk dalam salah satu blok. Penolakan

Indonesia atas dominasi salah satu blok bukan sebagai penanda kepasifan Indonesia, karena politik luar negeri bebas aktif berbeda dengan politik luar negeri netral. Politik luar negeri bebas aktif mewajibkan Indonesia ikut aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan dunia (Feith & Lance, 1988, hlm. 8), atau dengan kata lain Indonesia tetap aktif memberikan kontribusinya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sejak tahun 1948 Indonesia resmi menganut politik luar negeri bebas aktif yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan nasional dan internasional yang sedang berkembang, serta fleksibel (sesuai dengan gaya pemerintahan yang berlangsung) (Arista, 2016, hlm. 8).

Pada masa kepemimpinan Soekarno pelaksanaan prinsip bebas aktif baru dapat terlaksana dengan tepat pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953 (Feith & Lance, 1988, hlm. 36). Sedangkan pada masa sebelumnya Indonesia masih disibukkan dengan urusan domestik, sikap internasional yang ditunjukkan kabinet-kabinet pada masa sebelum kabinet Ali Sastroamidjojo terfokus pada bagaimana menggunakan tekanan internasional demi kepentingan-kepentingan domestik, seperti dalam perundingan-perundingan dengan Belanda (Haryanto, 2014, hlm. 23) dalam rangka membangun dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pada era Soekarno prinsip bebas aktif mulai menunjukkan eksistensinya tepatnya pada tahun 1953 yaitu masa kabinet Ali Sastroamidjojo I, karakteristik pelaksanaan prinsip bebas aktif era Soekarno adalah Indonesia menggandengkan politik bebas aktif dengan politik bertetangga baik. Hal tersebut terlihat dari upaya Kabinet Ali Sastroamidjojo I mendekati diri dengan negara-negara Asia Afrika dengan tujuan menggalang solidaritas negara-negara Asia Afrika untuk menghapuskan kolonialisme (Safitri, 2014, hlm. 15). Pemerintahan Soekarno berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara inisiator Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 dan Gerakan Non Blok (GNB) tahun 1961. Kedua *event* tersebut terlaksana dilatarbelakangi oleh perkembangan kolonialisme Barat yang saat itu masih menjadi musuh utama negara-negara berkembang.

Pada pergantian kepemimpinan selanjutnya tepatnya ketika Indonesia dipimpin oleh Soeharto kolonialisme sudah tidak ada lagi, sehingga prioritas utama pelaksanaan kebijakan luar negeri bukan lagi difokuskan pada upaya membantu negara-negara tetangga (negara berkembang) untuk melepaskan diri dari penjajahan, melainkan untuk

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

membangun ketertiban politik-keamanan maupun stabilitas ekonomi sebagai negara yang berkembang (Haryanto, 2014, hlm. 28).

Pada era kepemimpinan Soeharto setelah Indonesia mencapai ketahanan yang kuat seperti tujuan utama pemerintahan Orde Baru, negara-negara berkembang terutama negara-negara yang terlibat dalam KAA dan GNB mulai memikirkan cara untuk menyejajarkan diri dengan negara-negara maju, kemudian Indonesia mulai aktif berperan menggalang kesatuan negara-negara di Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) pada tahun 1967. Organisasi tersebut terus mengalami kemajuan pesat karena Soeharto memberi prioritas utama pada politik luar negeri dalam lingkaran konsentris pertama yaitu ASEAN (Arista, 2016, hlm. 10). Pada akhir tahun 1988 terjadi krisis ekonomi akut yang berkembang menjadi krisis multidimensi dan menjadi salah satu penyebab lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Indonesia, runtuhnya pemerintahan Orde Baru mengharuskan bangsa Indonesia menata kembali sistem politiknya dengan gerakan reformasi. Krisis ekonomi dan perubahan besar-besaran dalam tatanan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia pasca Pemerintahan Soeharto menjadikan politik luar negeri Republik Indonesia *inward looking*, artinya pemerintah memprioritaskan penyelesaian masalah domestik terutama krisis ekonomi beserta dampaknya. Oleh karena itu urusan genting yang berkaitan dengan kekuatan asing cenderung ‘dilepaskan’ (Nugroho, 2013, hlm.76).

Bukan hanya Indonesia yang mengalami perubahan pada tahun 1998, sebenarnya situasi dan kondisi lingkungan internasional juga telah banyak berubah sejak tahun 1990-an. Pada era 1990-an arena politik internasional penuh diwarnai dengan perubahan-perubahan baik dalam konteks permasalahan, pelaku hubungan internasional serta dalam konteks hubungan antar negara. Jika pada masa Perang Dingin hubungan antar negara terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan kubu non komunis di bawah pimpinan Amerika Serikat, berakhirnya Perang Dingin mengubah tata pola hubungan antar negara. Menurunnya peran ideologi dalam percaturan politik antar negara mengantarkan pada era pola hubungan internasional yang lebih mengedepankan kerjasama yang membawa negara-negara pada kondisi saling ketergantungan yang semakin meningkat (Clelland, 1986, hlm. 25). Seiring berlalunya era Perang Dingin, terjadi revolusi elektronik yang memunculkan globalisasi.

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Globalisasi mengubah aktor/pelaku dalam tata hubungan internasional dan mengakibatkan semakin kompleksnya hubungan antar negara. Noer (1983, hlm. 87) menyampaikan bahwa salah satu dampak dari globalisasi adalah hubungan antar negara satu dengan negara lainnya kian dipererat atau dipersingkat jaraknya oleh kemajuan teknik perhubungan dan komunikasi, demikian pula ketergantungan hidup antar negara, mendorong adanya kerjasama atau sekurang-kurangnya hubungan yang baik dengan negara lainnya.

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan kualitas kedaulatan negara di tengah-tengah bangkitnya globalisasi tidaklah mudah, karena Indonesia diharuskan proaktif menjalankan kerjasama internasional tetapi di sisi lain Indonesia harus menjaga eksistensinya sebagai negara yang bebas tanpa ketergantungan pada pihak asing (Yudhoyono, t.th, hlm. 13). Sejak awal sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono aktif menyumbangkan pemikirannya demi kemajuan Indonesia terutama dalam bidang militer, profesi yang ditekuninya (Maeswara, 2009, hlm. 22). Melihat kepedulian Susilo Bambang Yudhoyono pada keadaan Indonesia membuat Presiden Abdurrahman Wahid tertarik pada gagasan SBY dan mengajaknya berpartisipasi dalam kabinet. Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono tidak langsung menerima ajakan Presiden Abdurrahman Wahid dan setelah mempertimbangkan dengan matang, baru pada tahun 2000 Susilo Bambang Yudhoyono menerima ajakan Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Mentamben (Menteri Pertambangan dan Energi). Karir politik Susilo Bambang Yudhoyono terus berlanjut sampai pada masa pemerintahan Megawati. Dalam kabinet Gotong Royong (pimpinan Megawati) Susilo Bambang Yudhoyono diangkat menjadi Menkopolkam (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan). Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut Susilo Bambang Yudhoyono maju dalam Pilpres 2004 dengan menggandeng Yusuf Kalla sebagai wakil, dan pasangan tersebut menang dengan perolehan suara 33,57 % (Maeswara, 2009, hlm. 95).

Menurut Wiharyanto kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dalam Pemilu 2004 merupakan salah satu dampak globalisasi. Wiharyanto (2011) menyatakan bahwa:

Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla dalam Pemilu 2004 erat kaitannya dengan dampak globalisasi.

Hubungan globalisasi dengan kemenangan kandidat ini adalah dalam perspektif internasional, perluasan jaringan pasar dan

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkatnya kerja sama internasional adalah faktor-faktor yang menguntungkan bagi pasangan ini (hlm. 255).

Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden pertama Indonesia yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dibuktikan dengan penganugerahan medali demokrasi oleh *International Association of Political Consultarit* (IAPC) untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai apresiasi dari berlangsungnya Pemilu 2004 dengan demokrasi, jujur dan adil serta umum tertib dan lancar (Abdullah, 2009, hlm. 9). Pada masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, kabinet tersebut menyusun landasan operasional politik luar negeri pada tiga rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 yang isinya sebagai berikut:

- (1). Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- (2). Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia.
- (3). Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multiralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional di pandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional (Windiani, 2013, hlm. 3).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahannya memperkenalkan istilah '*navigating a turbulent ocean* atau mengarungi samudra yang bergolak' (Noventari, 2014, hlm. 125). Menurut SBY konsep yang diperkenalkan oleh Hatta 'mendayung di antara dua karang' dianggap tidak lagi sesuai karena kekuatan Blok Barat dan Blok Timur telah lama runtuh (Haryanto, 2014, hlm. 35). Berdasarkan ungkapan Presiden SBY tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang sangat drastis dalam perpolitikan nasional maupun internasional dan salah satu penyebab perubahan tersebut

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

adalah perkembangan globalisasi yang pesat sehingga membuat dunia seperti samudra yang bergolak.

Hubungan internasional pada era globalisasi tersebut bisa saja berbentuk hubungan persahabatan dan bisa juga berubah menjadi persaingan lalu mengarah pada peperangan memperebutkan kepentingan nasional suatu negara, karena setiap negara ingin memenuhi kebutuhan warga negaranya dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi negara (Lukman, 2009, hlm. 1). Sejalan dengan hal tersebut Indonesia memiliki tujuan pokok politik luar negeri yang menjadi pedoman untuk menjalin hubungan internasional di tengah pusaran globalisasi, tujuan pokok politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

Politik luar negeri Indonesia bertujuan menegakkan kemerdekaan, perdamaian dunia, melalui pembangunan bangsa-bangsa, pembinaan persahabatan dan kerjasama regional dan internasional, tanpa membedakan ideologi, sistem politik ataupun sistem sosial ekonomi masing-masing negara (Prihatyono, 2009, hlm. 4).

Sesuai dengan tujuan pokok politik luar negeri Indonesia tersebut dan dalam rangka menjawab tantangan globalisasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaksanakan politik luar negeri konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan *all directions foreign policy* atau politik luar negeri ke segala arah (Wiharyanto, 2011, hlm. 226). Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2004-2009 melaksanakan politik luar negeri konstruktif dengan memperkenalkan konsep 'diplomasi total' (Kawilarang, 2009, hlm. 1). Konsep diplomasi total memiliki pengertian bahwa Indonesia tidak memihak ke satu pihak melainkan Indonesia memilih menjalin hubungan baik dengan setiap negara, dengan memanfaatkan semua elemen baik pemerintah maupun non pemerintah untuk membantu menyukkseskan politik luar negeri. Konsep diplomasi total tersebut sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Pada periode pemerintahan yang kedua Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan pada masyarakat dunia bahwa Indonesia menganut paham *a million friends zero enemy* (Falahi, 2013, hlm. 228), yang mengandung makna merangkul sebanyak-banyaknya kawan dengan menggunakan *soft power* sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia tahun 2009-2014 yang bertugas melaksanakan kebijakan luar negeri berupaya untuk meningkatkan diplomasi Indonesia dalam rangka menciptakan dan memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan ataupun global (Setiawan, 2013, hlm.1).

Pelaksanaan prinsip bebas aktif yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan luar negeri, membuat Indonesia memiliki *image* baik di forum internasional. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari para aktor penting pelaksana politik luar negeri, terutama peran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia dan pelaksana kebijakan presiden oleh Hassan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2004-2009 dan Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2009-2014, maupun aktor lainnya sebagai pelaksana kebijakan luar negeri. Berbagai kebijakan luar negeri yang dilaksanakan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di lingkungan internasional, salah satu buktinya yaitu terlihatnya Indonesia dalam G-20 sedangkan dalam kancah regional Asia Tenggara Indonesia didaulat sebagai tuan rumah ASEAN di tahun 2010, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi sempat menjadi salah satu kandidat peraih nobel perdamaian, serta pernah diwacanakan sebagai kandidat Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (Falahi, 2013, hlm. 229).

Bagi Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa tidak mudah menjalankan tugas sebagai menteri luar negeri. Berbagai dinamika ketika melaksanakan kebijakan luar negeri menjadi *point* tersendiri bagi para pelaksana kebijakan luar negeri, salah satu penyebab dinamika yang terjadi adalah menguatnya globalisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi hubungan internasional tetapi globalisasi juga memberikan tantangan berupa dampak globalisasi. Dampak globalisasi tersebut terbagi menjadi dua yaitu secara positif globalisasi menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab sedangkan secara negatif globalisasi dipandang sebagai bentuk baru dari kolonialisme negara maju yang berusaha memaksakan bentuk budaya dan konsumsi (Yuniarto, 2014, hlm. 69). Globalisasi memberikan dampak positif berupa kemajuan teknologi informasi, perluasan jaringan pasar, iklim kompetisi, meningkatnya kerja sama internasional, demokratis, mengalirnya modal dan lain-lain. Dampak positif tersebut dimanfaatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah gaya hidup yang konsumtif, pragmatisme, pergeseran budaya lokal, dekadansi moral, pergaulan

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bebas dan ketergantungan yang mutlak terhadap bangsa lain. Dampak negatif tersebut terutama yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap bangsa lain tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut dijelaskan oleh Falahi (2013) yaitu:

... Karena menganut faham *a million friends zero enemy* membuat pemerintah cenderung tidak tegas dalam memutuskan tindakan ketika ada masalah politik menyangkut hubungan bilateral seperti pada kasus kegagalan pemerintah melindungi buruh imigran bahkan beberapa permasalahan dalam negeri tidak terselesaikan dengan baik seperti pemenuhan pangan bergantung impor atau terjadinya pergeseran budaya lokal dikarenakan masuknya budaya asing (hlm. 229).

Pelaksanaan prinsip bebas aktif pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono penting untuk diteliti karena kajian ini dapat memperlihatkan peranan Indonesia untuk menjaga perdamaian. Penulis juga merasa perlu memperkenalkan setiap menteri luar negeri di era Susilo Bambang Yudhoyono karena menteri luar negeri memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan politik luar negeri yaitu sebagai pelaksana kebijakan luar negeri. Menurut Alam (1998, hlm. 4) “politik luar negeri Indonesia yang berprinsip bebas aktif sangatlah fleksibel dalam pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dari lingkungan regional dan internasional sehingga dalam pelaksanaannya tampak memiliki gaya dan karakteristik yang berbeda-beda setiap periodenya”, berdasarkan pernyataan Alam tersebut maka timbul pertanyaan Jika pada tahun 1948 prinsip bebas aktif teretus karena adanya pertentangan antara Soviet dan Amerika, lalu bagaimana prinsip bebas aktif menjawab tantangan global hari ini. Pertanyaan tersebut menjadi alasan pentingnya pengkajian penelitian ini untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan prinsip bebas aktif di era globalisasi ini.

Selain itu penelitian ini juga diperlukan karena Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden yang dapat dikatakan berhasil dalam pemerintahannya. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode kedua pada tahun 2009 sampai 2014. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari *profile* pribadi Susilo Bambang Yudhoyono (Iskandar, 2007, hlm. 337) dan kebijakannya yang terbukti dapat mengembalikan *image* Indonesia di

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lingkungan dunia internasional, serta Nugroho (2013, hlm. 78) menambahkan “Keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlepas dari peran aktif para menteri luar negeri sebagai pelaksana kebijakan luar negeri”.

Masalah perpolitikan di Indonesia khususnya terkait hubungan internasional memang sudah banyak dikaji oleh para sejarawan (yang melihat dari segi historis) maupun oleh para politikus. Namun pelaksanaan prinsip bebas aktif di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono belum banyak dikaji sehingga dalam kajian ini akan difokuskan pada pelaksanaan prinsip bebas aktif di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Adapun alasan penulis membatasi kajian hanya dari tahun 2004 sampai dengan 2014 adalah terkait dengan masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada priode pertama dan kedua adalah dari tahun 2004-2014, selain itu alasan penulis mengambil dua periode karena dalam dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan lebih terlihat bagaimana SBY yang dibantu oleh dua menteri luar negerinya dalam melaksanakan prinsip bebas aktif. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan memberi singkatan nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi SBY hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam membaca tulisan ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti di atas. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam menyusun skripsi, yang menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif pada masa kepemimpinan SBY (2004-2014)”, untuk mempermudah dan mengarahkan penulis dalam menyusun pembahasan, maka penulis merumuskan rumusan batasan-batasan masalah penelitian sebagai berikut:

- (1). Bagaimana kondisi sosial-politik dalam dan luar negeri pada masa kepemimpinan SBY?
- (2). Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan SBY sebagaimana yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda (2004-2009) dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (2009-2014)?

**Widia Wahyuni, 2018**

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- (3). Bagaimana dampak pelaksanaan prinsip bebas aktif pada masa kepemimpinan SBY (2004-2014) terhadap citra Indonesia dalam forum internasional?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif pada masa kepemimpinan SBY (2004-2014). Selain itu penelitian ini bertujuan untuk:

- (1). Memperoleh gambaran secara umum mengenai kondisi sosial-politik dalam dan luar negeri pada masa kepemimpinan SBY, meliputi: *profile* SBY, kondisi sosial-politik Indonesia pada masa kepemimpinan SBY (2004-2014), kondisi sosial-politik lingkungan internasional pada masa kepemimpinan SBY.
- (2). Menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan SBY sebagaimana yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda (2004-2009) dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (2009-2014), meliputi: karakteristik kebijakan politik luar negeri SBY (2004-2014), *profile* Hassan Wirajuda, *profile* Marty Natalegawa, ASEAN, hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada masa kepemimpinan SBY.
- (3). Menjelaskan dampak pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif pada masa kepemimpinan SBY (2004-2014) terhadap citra Indonesia dalam forum internasional.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk menambah khazanah penulisan karya ilmiah di Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia khususnya mengenai Sejarah Nasional Indonesia.
- (2). Pendokumentasian peristiwa sejarah Indonesia yang berkenaan dengan politik luar negeri Indonesia pada era SBY.
- (3). Terkait dengan pembelajaran sejarah penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peserta didik satuan pendidikan SMA/MA/SMK, karena skripsi ini sesuai dengan materi

Widia Wahyuni, 2018

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO**

**BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sejarah Indonesia kelas XII pada KI 3 dan KD 3.8. KI 3 disebutkan bahwa memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, selanjutnya untuk KD 3.8 mengevaluasi kontribusi bangsa Indonesia pada perdamaian dunia dengan salah satu materi bahasannya yaitu pelaksanaan prinsip bebas aktif pada masa reformasi.

### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi skripsi ini adalah sesuai dengan struktur organisasi yang telah diatur dalam karya tulis ilmiah UPI (2016, hlm. 20-31) yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan memuat latar belakang penelitian yang penulis angkat yaitu ‘Pelaksanaan prinsip bebas aktif di bawah kepemimpinan SBY 2004-2014’. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai batasan-batasan masalah penelitian yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian melalui rumusan masalah, selanjutnya dalam bab ini penulis juga memaparkan tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan memuat mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ambil, serta dalam bab ini juga akan memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti dan posisi teoritis penulis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk pemaparan kajian pustaka dalam skripsi ini akan lebih bersifat deskriptif, berfokus pada topik dan lebih mengedepankan sumber rujukan terkini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan diuraikan metode yang digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian mengenai judul yang penulis ambil, yaitu metode penelitian historis dengan langkah-langkah penelitian yaitu heuristik, kritik dan historiografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk teknik penelitian penulis menggunakan teknik penelitian deskripsi, narasi dan analisis.

**Widia Wahyuni, 2018**

**PELAKSANAAN PRINSIP BEBAS AKTIF DI BAWAH KEPEMIMPINAN SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab IV Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Bebas Aktif Pada Masa Kepemimpinan SBY (2004-2014), bab ini menyampaikan dua hal utama yakni temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan analisis data sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini akan memaparkan simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah serta dalam bab ini juga penulis akan memberikan rekomendasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang sama.